

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya target pembangunan berkelanjutan yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan terutama bagi perusahaan yang mempunyai dampak lingkungan yang tinggi, menjadikan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) mendapat perhatian yang luar biasa (Nguyen, 2020). Perusahaan di Indonesia yang mempunyai dampak lingkungan yang tinggi tersebut diwajibkan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan dan mengelola program tanggung jawab sosial mereka. Dimana bentuk tanggung jawab sosial perusahaan pun dapat diwujudkan dengan menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi mengenai indikator kinerja keberlanjutan. Hal ini menjadikan semakin banyak perusahaan yang mulai mempublikasikan laporan keberlanjutan perusahaannya kepada *stakeholders*. Sehingga dengan dipublikasikannya laporan keberlanjutan maka perusahaan dapat dianggap telah memenuhi kewajibannya kepada *stakeholders* dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Lulu, 2020).

Laporan keberlanjutan dipublikasikan atas permintaan dari pemegang saham dan *stakeholders* lain dengan tujuan untuk menilai kinerja sosial dan lingkungan perusahaan, serta atas permintaan dari sekelompok orang yang mengandalkan data selain keuangan untuk mengetahui risiko dan kemungkinan performa keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu perusahaan-perusahaan yang mempublikasikan laporan keberlanjutan mengeluarkan upaya dan sumber daya yang besar untuk dapat mengungkapkan laporan tersebut secara sukarela. Perusahaan dapat memperoleh beberapa keuntungan dengan melaporkan laporan keberlanjutan secara sukarela, seperti meningkatkan citra dan merek perusahaan, penyertaan dalam portofolio investasi yang bertanggung jawab secara sosial, lebih mematuhi kebijakan pemerintah dan menghindari litigasi, meningkatkan moral pegawai dan kepuasan pelanggan, serta dapat meningkatkan penjualan dan menurunkan biaya (Iyer & Lulseged, 2013). GRI (*Global Reporting Initiative*) sebagai pedoman dalam menyusun laporan keberlanjutan dan menetapkan

kerangka kerja umum untuk pelaporan keberlanjutan diharapkan mampu menumbuhkan kualitas dan pengungkapan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan sosial dan lingkungan (Kolk & Perego, 2010).

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menerangkan bahwa bagi perusahaan perseroan terbatas yang terlibat dalam kegiatan operasional yang berdampak pada sumber daya alam wajib untuk mengimplementasikan dan mengelola program tanggung jawab sosial (Harymawan et al., 2020). Selanjutnya untuk mendukung peningkatan jumlah perusahaan yang melaporkan laporan keberlanjutan pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 51/M-IND/PER/6/2015 tentang Pedoman Standar Industri Hijau (SIH), yang diharapkan dapat menjadi jembatan dalam upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan bagi seluruh perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan pada sektor industri. Pedoman SIH ini pada tahap awal bersifat sukarela yang ke depannya secara ketat akan bersifat wajib dan akan diberikan sanksi bagi perusahaan yang melanggar peraturan (Suharyani et al., 2019). Selain itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2017 menerbitkan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik yang mengamanatkan Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik untuk menyusun dan mengkomunikasikan rencana tindakan keuangan berkelanjutan serta mempublikasikan laporan keberlanjutan.

Perkembangan pengungkapan laporan keberlanjutan pun telah menjadi bidang penelitian yang banyak dilakukan di berbagai negara dan didominasi oleh perusahaan-perusahaan multinasional besar saat ini (Aktas et al., 2013). Kuzey dan Uyar (2017) menyatakan bahwa hanya sebanyak 17% perusahaan di Turki yang telah mempublikasikan laporan keberlanjutan dan sebanyak 15% telah mempublikasikan laporan keberlanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh GRI. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Correa-Garcia et al. (2020) yang melakukan penelitian pada kelompok bisnis non keuangan di wilayah Amerika Latin, yang memperoleh hasil hanya sebanyak 17,3% perusahaan di Chili yang telah mempublikasikan laporan keberlanjutan, Kolombia sebanyak 19,8%, Peru

sebanyak 14,2%, dan Meksiko dengan tingkat publikasi laporan tertinggi sebanyak 48,8%. Sementara, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Qisthi dan Fitri (2020) diketahui bahwa dari sebanyak 694 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 hanya ditemukan sebanyak 35 perusahaan yang mempublikasikan laporan keberlanjutan secara konsisten. Selain itu berkaitan tentang keberlanjutan perusahaan, diketahui hanya industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang telah memperoleh sertifikasi berkelanjutan yang diakui dalam taraf internasional, yaitu dari lembaga *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO). Adanya pencapaian atas sertifikasi berkelanjutan tersebut menunjukkan tingginya komitmen perusahaan pada sektor industri perkebunan kelapa sawit dalam mengelola usahanya secara berkelanjutan. Sementara sektor-sektor industri lain seperti industri barang, jasa, dan komoditas lainnya sampai saat ini belum memiliki sertifikasi berkelanjutan yang diakui baik pada tingkat nasional maupun internasional (Elfadina, 2020).

Suatu laporan keuangan yang disajikan perusahaan dapat dipandang memiliki kualitas yang tinggi apabila laporan tersebut memperoleh opini audit yakni wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) dan laporan tersebut telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sementara kualitas laporan keberlanjutan (*sustainability report*) di Indonesia dapat dilihat dari pemeringkatan laporan keberlanjutan pada tingkat asia (*Asia Sustainability Report Rating/ASRRAT*) yang dilaksanakan oleh badan *National Center for Sustainability Reporting* (NCSR). Dimana peringkat laporan keberlanjutan perusahaan dibagi menjadi empat yakni Platinum, Gold, Silver, dan Bronze. Adapun diketahui hanya sebanyak 5 perusahaan dari 44 perusahaan Indonesia yang mengikuti ASRRAT 2020 yang memperoleh peringkat Platinum atau peringkat tertinggi. Peringkat tertinggi tersebut diperoleh yang berarti perusahaan telah menyusun laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar GRI 2016 dan telah dilakukan *assurance* atau diaudit oleh KAP. Sedangkan sebanyak 32 perusahaan Indonesia memperoleh peringkat Gold, 3 perusahaan memperoleh peringkat Silver, dan 4 perusahaan memperoleh peringkat Bronze (Suhartadi, 2020). Sehingga dengan adanya fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan di Indonesia dinilai masih rendah.

Dimana hal ini tidak lain disebabkan karena masih rendahnya komitmen perusahaan di Indonesia terhadap program keberlanjutan serta ketidaksadaran perusahaan akan pentingnya mempublikasikan *corporate sustainability reporting* kepada para pemangku kepentingan (Rudyanto & Siregar, 2018).

Saat ini perusahaan diharuskan untuk mempertimbangkan tuntutan-tuntutan dari para pemangku kepentingan dalam menyusun strategi yang akan diterapkan, ataupun risiko apabila *stakeholders* menarik dukungan mereka terhadap perusahaan. Hal ini disebabkan karena para pemangku kepentingan semakin berpihak pada perusahaan yang mendapatkan keuntungan atau kinerja ekonomi yang berasal dari aktivitas operasional yang ramah lingkungan dan memerhatikan aspek keberlanjutan (Huang & Kung, 2010). Adanya tuntutan-tuntutan dari para pemangku kepentingan tersebut menjadikan perusahaan mendapat tekanan untuk menginformasikan seluruh aktivitas komitmen sosial dan lingkungannya dalam wujud laporan keberlanjutan yang berkualitas. Tekanan dari *stakeholders* tersebut juga disebabkan karena masih sedikitnya industri-industri di Indonesia yang menerapkan program keberlanjutan (Alfaiz & Aryati, 2019). Hal ini karena jika suatu perusahaan telah menerapkan program keberlanjutan, maka perusahaan cenderung memerhatikan *stakeholders* dalam kegiatan usahanya (Kamila & Purwanti, 2020). Adapun tekanan yang berasal dari *stakeholders* pada industri ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu *environmentally sensitive industries*, *customer proximity industries*, dan *employee-oriented industries* (Sellami et al., 2019).

Timbulnya tekanan industri yang berasal dari lingkungan menjadikan terdorongnya para pemangku kepentingan untuk lebih mengawasi kegiatan bisnis perusahaan-perusahaan di Indonesia dan dampak berkelanjutan dari bisnis tersebut secara aktif. Hal ini karena masih banyak ditemukannya perusahaan-perusahaan yang melakukan kerusakan lingkungan sekitar (Alfaiz & Aryati, 2019). Dimana salah satu contoh kerusakan lingkungan tersebut ialah seperti pencemaran Sungai Malinau, Kalimantan Utara yang terjadi karena jebolnya tanggul penampungan limbah tambang batu bara milik PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) pada tanggal 8 Februari 2021 yang berdampak pada rusaknya ekosistem sungai dan terganggunya akses air bersih bagi 14 desa di sekitas sungai

tersebut (Nunukan & Dzulviqor, 2021). Adanya fenomena ini pun menjadikan perusahaan yang sensitif terhadap lingkungan mendapat tekanan untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan khususnya aspek lingkungan yakni terkait dengan pelepasan air limbah dan limbah yang diatur dalam pedoman GRI (GRI, 2016).

Tekanan industri yang berasal dari pelanggan timbul karena pelanggan di Indonesia pada era ini cenderung semakin kritis terhadap kualitas produk, transparansi informasi terkait produk dan dampak dari proses pembuatan produk tersebut terhadap lingkungan (Wening, 2020). Semakin kritisnya pelanggan tersebut disebabkan karena masih terdapatnya industri-industri yang tidak menggunakan bahan ramah lingkungan dalam membuat produk, seperti pada kasus restoran cepat saji yakni McDonald's yang mendapat protes dari para pelanggannya karena menggunakan sedotan kertas yang tidak bisa didaur ulang. Sehingga hal ini menyebabkan restoran tersebut memperoleh tuntutan dari para pelanggannya untuk menerapkan komitmen atas tanggung jawab lingkungannya dengan produk ramah lingkungan yang sesuai dengan harapan pelanggan (Priambodo & Nariswari, 2019). Adanya kasus tersebut menyebabkan industri yang dekat dengan pelanggan mendapat urgensi untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial dan program keberlanjutannya dalam wujud laporan keberlanjutan agar dipandang memiliki citra dan reputasi yang baik dihadapan para pemangku kepentingan (Hamudiana & Achmad, 2017).

Karyawan cenderung mempunyai kekuatan yang dapat memengaruhi dan menimbulkan tekanan terhadap perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungannya (Greenwood, 2007). Dimana tekanan ini dapat muncul akibat dari masih ditemukannya perusahaan yang mengabaikan hak-hak para karyawannya, seperti yang terjadi pada karyawan Garden Palace Hotel Surabaya yang diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan dan tidak memberikan gaji, uang pesangon, dan tunjangan hari raya bagi karyawan yang diberhentikan tersebut. Selain itu diketahui bahwa perusahaan juga mengabaikan hak-hak karyawan perempuan, seperti perihal cuti hamil, cuti haid, cuti melahirkan, dan hak lainnya (Masduki, 2020). Sehingga terjadinya fenomena ini menyebabkan perusahaan memperoleh tuntutan untuk memenuhi hak-hak

karyawannya tersebut dan mengungkapkannya dalam bentuk laporan keberlanjutan yang memadai (Greenwood, 2007).

Sejumlah penelitian terdahulu menyatakan bahwa ditemukan pengaruh signifikan positif antara *environmentally sensitive industries* dengan kualitas pengungkapan *sustainability report* (Herawaty et al., 2020; Lulu, 2020; Nurumina et al., 2020; Rudyanto & Siregar, 2018; Sellami et al., 2019; Suharyani et al., 2019). Akan tetapi peneliti lainnya yakni Alfaiz dan Aryati (2019) dan Hamudiana dan Achmad (2017) mengungkapkan bahwa tidak ditemukan adanya pengaruh signifikan antara *environmentally sensitive industries* dengan kualitas pengungkapan *sustainability report*.

Penelitian yang dilakukan oleh Alfaiz dan Aryati (2019), Lulu (2020), Rudyanto dan Siregar (2018), Sellami et al. (2019), dan Suharyani et al. (2019) memperoleh hasil bahwa *customer proximity industries* berpengaruh signifikan positif kepada kualitas pengungkapan *sustainability report*. Sementara penelitian yang dilaksanakan oleh Hamudiana dan Achmad (2017) dan Nurumina et al. (2020) menyatakan bahwa *customer proximity industries* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*.

Beberapa penelitian sebelumnya juga mengungkapkan bahwa ditemukan adanya pengaruh signifikan positif pada *employee-oriented industries* terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report* (Alfaiz & Aryati, 2019; Hamudiana & Achmad, 2017; Nurumina et al., 2020; Sellami et al., 2019; Suharyani et al., 2019). Sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh Rudyanto dan Siregar (2018) menunjukkan bahwa *employee-oriented industries* mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*. Berbeda halnya dengan penelitian yang dijalankan oleh Herawaty et al. (2020) dan Lulu (2020) yang menyatakan bahwa *employee-oriented industries* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*.

Disisi lain, mekanisme dan konsep dari *Good Corporate Governance* (GCG) dapat diimplementasikan dalam bentuk praktik dan pengungkapan laporan keberlanjutan (Aliniar & Wahyuni, 2017). Hal ini karena *corporate governance* dianggap sebagai mekanisme yang sangat penting dalam menggambarkan hak, ekspektasi, kepentingan, dan tanggung jawab kepada setiap kelompok *stakeholders*

dalam sebuah perusahaan (Ho & Wong, 2001). Sehingga dengan memerhatikan semua aspek *stakeholders* tersebut maka fokus dari akuntabilitas perusahaan tidak lagi hanya berpusat atau berorientasi pada pemegang saham (*shareholders*) saja (Barung et al., 2018). Oleh karena itu permintaan akan pengungkapan laporan keberlanjutan tidak hanya berasal dari tekanan *stakeholders*, tetapi juga berasal dari sistem tata kelola suatu perusahaan. Sehingga dengan adanya tekanan yang tinggi dari dalam perusahaan untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan akan mendorong perusahaan menghasilkan laporan tersebut dengan kualitas yang tinggi (Rudyanto & Siregar, 2018). Adapun salah satu bentuk dari mekanisme pengawasan eksternal *corporate governance* adalah *ownership concentration*, dimana kinerja pihak manajemen perusahaan dalam mengelola pengungkapan laporan keberlanjutan dapat ditentukan dari seberapa besar *ownership concentration* yang dimiliki oleh suatu perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Barung et al. (2018) menyatakan bahwa *ownership concentration* mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*. Sementara penelitian yang dijalankan oleh Correa-Garcia et al. (2020) membuktikan bahwa ditemukan pengaruh signifikan negatif antara *ownership concentration* dengan kualitas pengungkapan *sustainability report*. Akan tetapi penelitian yang dilaksanakan oleh Aliniar dan Wahyuni (2017) dan Sellami et al. (2019) menunjukkan bahwa *ownership concentration* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*.

Rudyanto dan Siregar (2018) dalam penelitiannya menggunakan tekanan pemangku kepentingan yaitu *environmentally sensitive industries*, *customer proximity industries*, *employee-oriented industries*, dan *investor-oriented industries* serta mekanisme tata kelola perusahaan yang terdiri dari *board commissioner's effectiveness* dan *family ownership* sebagai variabel independen untuk menguji pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kualitas *sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2010-2014. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Herawaty et al. (2020) menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, tekanan pemangku kepentingan yaitu *environmentally sensitive industries*, *employee-oriented industries*, dan *investor-oriented industries*

serta mekanisme tata kelola perusahaan yang terdiri dari *board commissioner's effectiveness* dan *family ownership* terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2015-2017 dengan menggunakan *assurance* sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini hendak menelaah faktor-faktor yang dapat memengaruhi kualitas pengungkapan *sustainability report*, seperti tekanan pemangku kepentingan pada industri tertentu yang terdiri dari *environmentally sensitive industries*, *customer proximity industries*, dan *employee-oriented industries*. Faktor-faktor ini ditetapkan oleh peneliti dikarenakan masih ditemukannya disimilaritas pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun kebaruan dalam penelitian ini adalah dengan menambahkan variabel *ownership concentration* sebagai mekanisme pengawasan eksternal *corporate governance*. Variabel *ownership concentration* ini dipilih oleh peneliti karena masih sedikitnya penelitian di Indonesia yang ditemukan terkait dengan pengaruh *ownership concentration* terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*.

Selain itu, penelitian ini akan menggunakan indikator GRI G4 dan Standar GRI 2016 dalam mengukur variabel dependen serta menetapkan periode penelitian selama tiga tahun dari 2017-2019. Kedua indikator tersebut dipilih untuk digunakan sebagai pengukuran karena tidak banyak penelitian sebelumnya yang menggunakan pengukuran tersebut secara bersamaan dan dipilih karena terdapat transisi penggunaan indikator GRI G4 dan Standar GRI 2016 yang dipakai oleh perusahaan. Sehingga penelitian ini akan berfokus pada pengaruh tekanan pemangku kepentingan yang terdiri dari *environmentally sensitive industries*, *customer proximity industries* dan *employee-oriented industries* serta *ownership concentration* sebagai sistem pemantauan eksternal *corporate governance* terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *environmentally sensitive industries* berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*?

Tasya Karindra, 2021

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

2. Apakah *customer proximity industries* berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*?
3. Apakah *employee-oriented industries* berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*?
4. Apakah *ownership concentration* berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pengaruh signifikan *environmentally sensitive industries* terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*.
2. Untuk menganalisa pengaruh signifikan *customer proximity industries* terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*.
3. Untuk menganalisa pengaruh signifikan *employee-oriented industries* terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*.
4. Untuk menganalisa pengaruh signifikan *ownership concentration* terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*.

I.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat berguna penggunaannya, baik dalam aspek teoritis maupun praktis. Adapun manfaat-manfaat yang ingin dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris dan pengetahuan tentang bagaimana landasan teori yakni teori pemangku kepentingan dan teori legitimasi yang digunakan dapat menjelaskan permasalahan praktis terhadap pengungkapan *sustainability report* yang berkualitas.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang berguna bagi:

a. Pihak Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak investor dalam berinvestasi dan untuk mengetahui bagaimana program pembangunan berkelanjutan serta kualitas pengungkapan *sustainability report* perusahaan.

b. Pihak Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat membantu regulator yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan OJK dalam memperbaiki dan menyempurnakan peraturan yang mengatur mengenai implementasi dan publikasi *sustainability report* sehingga dapat mendorong tingkat kesadaran dan perhatian perusahaan di Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai arti penting dan kegunaan atas pengungkapan *sustainability report* yang dipublikasikan oleh perusahaan.